



Implementasi Fungsi Manajemen Pemerintahan dalam Penanganan Kasus Stunting di Kelurahan Suka Asih, Kota Tangerang

Diana Syahra^{1*}, Keisha Maulidia², Devina Ratna Suryani³

Universitas Yuppentak Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 30, 2026

Revised March 01, 2026

Accepted March 02, 2026

Available online March 02, 2026

Kata Kunci :

Pemerintah Kelurahan, Stunting, Kebijakan Publik, Peran Pemerintah.

Keywords:

Village Government, Stunting, Public Policy, Government Role.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kelurahan dalam penanganan stunting di Kelurahan Suka Asih, Kota Tangerang. Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah di tingkat lokal, khususnya dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan instansi terkait, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah menjalankan perannya dalam penanganan stunting melalui pelaksanaan program kesehatan, koordinasi lintas sektor, serta upaya sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya koordinasi antar pihak terkait, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah kelurahan melalui peningkatan koordinasi, kapasitas aparatur, dan partisipasi masyarakat agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the village government in addressing stunting in Suka Asih Village, Tangerang City. Stunting is a public health issue that requires active involvement of the government at the local level, particularly in implementing programs and policies established by the central and regional governments. This research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing secondary data obtained from official government documents, reports from relevant institutions, and scientific literature related to the research topic. The results indicate that the village government has carried out its role in stunting management through the implementation of health programs, cross-sectoral coordination, and community outreach efforts. However, several challenges remain, including limited resources, suboptimal coordination among related stakeholders, and insufficient community participation. Therefore, strengthening the role of the village government through improved coordination, capacity building of local officials, and increased community participation is necessary to ensure that stunting prevention programs can be implemented more effectively.

1. PENDAHULUAN

Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat krusial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat defisiensi gizi kronis dan faktor lingkungan yang menyebabkan tinggi badan anak lebih rendah dibanding standar usianya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, produktivitas masa depan, dan kualitas sumber daya manusia secara

*Corresponding author

E-mail addresses: dianasyahra591@gmail.com (Diana Syahra)

umum (Black et al., 2013; Kemenkes RI, 2022; Prendergast & Humphrey, 2014; UNICEF, 2022; Unicef & WHO, 2020).

Di Indonesia, penurunan angka stunting telah menjadi prioritas nasional melalui program intervensi dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sebagaimana diatur dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada implementasi di tingkat lokal, terutama di pemerintahan kelurahan yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pemetaan balita berisiko, pemantauan posyandu, edukasi gizi, dan kolaborasi lintas sektor dengan puskesmas, PKK, serta lembaga sosial setempat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; Lubis et al., 2023; BKKBN, 2022; TNP2K, 2018; Perpres RI No. 72 Tahun 2021; Bappenas, 2020; Kemenko PMK, 2018).

Kelurahan sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memegang peranan strategis dalam operasionalisasi kebijakan stunting. Mereka harus mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang kontekstual, melakukan perencanaan berbasis data, mengorganisir sumber daya (aparatur dan kader), melaksanakan kegiatan intervensi, serta mengawal program melalui monitoring dan evaluasi. Untuk menganalisis bagaimana aspek-aspek tersebut dijalankan, teori manajemen pemerintahan menjadi sangat relevan (Wahab, 2016; Nugroho, 2018; Dwiyanto, 2011; Suryanto, 2019).

Salah satu kerangka teori manajemen yang sering digunakan adalah teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang dikemukakan oleh George R. Terry. Terry menjelaskan bahwa manajemen adalah proses khas yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Terry, 1974; Siagian, 2014; Robbins & Coulter, 2018). Fungsi planning mengharuskan pemerintah kelurahan menyusun strategi berdasarkan analisis data stunting (misalnya angka balita yang terindikasi, kondisi sanitasi, dan kerentanan sosial). Fungsi organizing menuntut struktur kerja yang jelas, pembagian tugas antar aparatur dan kader, serta koordinasi lintas pihak. Fungsi actuating berarti mendorong pelaksanaan program melalui edukasi, pemberian makanan tambahan, dan kegiatan posyandu. Sedangkan fungsi controlling diperlukan untuk monitoring pertumbuhan anak, evaluasi program, dan tindak lanjut atas temuan lapangan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen POAC dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan kelurahan, dapat memperjelas pembagian tugas serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Penelitian pada tingkat pemerintahan kelurahan menunjukkan bahwa penerapan POAC mampu membantu aparatur dalam menjalankan peran dan tanggung jawab secara lebih terstruktur (Pratama & Nugroho, 2020). Penelitian lain di lembaga komunitas perkotaan juga menyoroti peran POAC dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan lokal. Sementara itu, di sektor kesehatan publik, fungsi POAC telah terbukti meningkatkan efektivitas layanan melalui manajemen dan pengendalian data (Pratama & Nugroho, 2020).

Di sisi stunting, berbagai literatur mengungkap bahwa stunting dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain pola makan ibu, kondisi sanitasi, tingkat pengetahuan masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi keluarga (Hidayati & Mahmudah, 2021; WHO, 2018; Victora et al., 2008). Studi tinjauan literatur juga menyoroti bahwa pelaksanaan intervensi pencegahan stunting di tingkat lokal sering kali terhambat oleh keterbatasan data yang valid dan lemahnya koordinasi antar sektor terkait (Putra & Suryani, 2022; Torlesse et al., 2016; Beal et al., 2018). Selain itu, program penyuluhan gizi dan pemantauan balita melalui kegiatan posyandu di tingkat kelurahan telah menjadi strategi utama dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Rahmaddian et al., 2022; Rahayu et al., 2021; Kurniawati et al., 2020).

Di Kelurahan Suka Asih, beberapa kasus stunting ditemukan, baik pada balita maupun ibu hamil. Contoh kasus yang disajikan dalam pembahasan ini bersumber dari laporan dan dokumentasi resmi kelurahan serta puskesmas sebagai data sekunder. Misalnya, terdapat balita berusia 18 bulan yang mengalami gagal tumbuh karena asupan gizi yang kurang dan kondisi

keluarga dengan ekonomi terbatas. Selain itu, beberapa ibu hamil dilaporkan mengalami kekurangan gizi sehingga berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Untuk mengatasi masalah ini, kelurahan telah menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diberikan secara rutin melalui posyandu. Balita yang terindikasi stunting memperoleh Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa makanan bergizi tinggi, seperti bubur fortifikasi dan susu tambahan, sedangkan ibu hamil mendapatkan paket PMT khusus yang mengandung zat besi, protein, dan mikronutrien penting. Program tersebut juga dilengkapi dengan edukasi gizi bagi keluarga agar pola konsumsi sehari-hari dapat mendukung pertumbuhan dan kesehatan ibu serta anak. Intervensi ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah kelurahan dalam menekan angka stunting melalui pendekatan yang terukur dan berbasis data lapangan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Lubis et al., 2023; Rosha et al., 2017; Aridiyah et al., 2015).

Meskipun berbagai upaya penanganan stunting telah dilaksanakan di tingkat kelurahan, kajian akademik yang menempatkan stunting sebagai persoalan tata kelola dan manajemen pemerintahan masih menunjukkan gap riset yang signifikan. Sebagian besar penelitian stunting masih didominasi oleh pendekatan kesehatan masyarakat dan gizi, sementara kajian yang menempatkan stunting dalam perspektif tata kelola dan manajemen pemerintahan relatif terbatas. Di sisi lain, penelitian mengenai penerapan fungsi manajemen POAC umumnya diarahkan pada organisasi sektor swasta atau institusi publik di tingkat kabupaten/kota, sehingga konteks birokrasi pemerintahan kelurahan yang memiliki karakteristik, kewenangan, dan keterbatasan sumber daya yang berbeda belum banyak dikaji secara aplikatif. Akibatnya, intervensi stunting di tingkat kelurahan sering kali bersifat fragmentaris, seperti hanya berfokus pada edukasi atau pemantauan, tanpa analisis manajerial yang menyeluruh yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis penerapan fungsi manajemen pemerintahan (POAC) dalam penanganan stunting di tingkat kelurahan.

Melihat urgensi tersebut, Kelurahan Suka Asih di Kota Tangerang menjadi lokasi kajian strategis. Kelurahan ini memiliki dinamika sosial-ekonomi yang cukup kompleks dan peran aktif aparatur kelurahan dalam program kesehatan masyarakat. Analisis penerapan POAC di Suka Asih dapat mengungkap sejauh mana fungsi manajemen terpadu di tingkat lokal telah digunakan dalam menanggulangi stunting, serta kendala apa saja yang muncul dalam praktik nyata. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi manajemen pemerintahan (POAC) oleh Pemerintah Kelurahan Suka Asih dalam penanganan kasus stunting, serta mengidentifikasi hambatan dan rekomendasi perbaikan manajerial.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur manajemen publik di konteks lokal serta kontribusi praktis dengan rekomendasi kebijakan agar program percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder untuk mengkaji penerapan fungsi manajemen pemerintahan dalam penanganan stunting di Kelurahan Suka Asih berdasarkan teori *POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)* dari George R. Terry. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran proses manajerial yang tercermin dalam dokumen resmi dan publikasi ilmiah, bukan pada pengukuran kuantitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Kelurahan Suka Asih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingkat kasus stunting yang sebelumnya relatif tinggi, keberadaan program intervensi gizi unggulan seperti

SATEASAMI dan PMT Posyandu, serta struktur aparatur dan kader yang memadai untuk mendukung implementasi program. Kelurahan ini menjadi representasi masyarakat urban dengan keragaman partisipasi warga, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan fungsi manajemen POAC dalam penanganan stunting.

Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan penerapan fungsi manajemen pemerintahan berdasarkan teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) oleh Pemerintah Kelurahan Suka Asih dalam penanganan stunting. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kebijakan nasional, program tingkat daerah, serta implementasi program di tingkat kelurahan, termasuk PMT Posyandu. Perlu dicatat bahwa program SATEASAMI sebelumnya telah berjalan namun saat ini sudah tidak diterapkan, sehingga fokus pelaksanaan program stunting di Kelurahan Suka Asih saat ini adalah pemberian Makanan Tambahan (PMT) di posyandu. Uraian berikut menggambarkan bagaimana masing-masing fungsi manajemen dijalankan beserta kendala dan respons manajerial yang muncul di lapangan.

Planning (Perencanaan)

Tahap perencanaan merupakan fondasi bagi efektivitas program penanganan stunting. Dalam konteks Kelurahan Suka Asih, perencanaan dilakukan melalui penyusunan strategi berbasis data, termasuk pendataan balita, pemetaan keluarga berisiko, serta identifikasi faktor lingkungan dan sosial yang memengaruhi status gizi anak. Perencanaan pemerintah kelurahan pada isu stunting dipengaruhi oleh kebijakan nasional seperti *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting* yang menekankan intervensi 1.000 HPK, integrasi program, dan fokus pada keluarga sasaran prioritas. Arahannya ini kemudian diterjemahkan di tingkat kota melalui program Walikota Tangerang, sebelumnya termasuk SATEASAMI (Satu Telur Satu Minggu) sebagai intervensi gizi tambahan, namun saat ini program tersebut sudah tidak berjalan. Fokus kegiatan sekarang adalah pemberian PMT di posyandu.

Dalam penyusunan rencana kegiatan, perangkat kelurahan bekerja sama dengan puskesmas, kader posyandu, dan PKK untuk menentukan target, jadwal posyandu, sasaran pemberian PMT, serta mekanisme distribusi bantuan telur mingguan pada balita. Pendekatan berbasis data ini penting karena jumlah balita, tingkat risiko gizi, serta pola kehadiran posyandu di setiap RW berbeda-beda. Selain itu, perencanaan di Suka Asih mempertimbangkan kearifan lokal dan perilaku masyarakat. Misalnya, kebiasaan sebagian warga yang sering terlambat datang ke posyandu mengharuskan penyesuaian strategi penjadwalan dan distribusi agar program tetap berjalan efektif. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berfokus pada target gizi, tetapi juga pada manajemen perilaku dan kedisiplinan masyarakat. Secara keseluruhan, fungsi planning telah dijalankan dengan cukup baik meskipun masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat analisis data secara *real time* dan meningkatkan partisipasi warga melalui perencanaan berbasis komunitas (*community based planning*).

Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan langkah untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia, peralatan, dan mekanisme kerja tersusun secara jelas dan terarah. Di Kelurahan Suka Asih, fungsi organizing tampak dalam pembagian tugas antar aparatur, kader posyandu, PKK, dan pendamping gizi.

Struktur organisasi penanganan stunting biasanya terdiri dari:

- a) Lurah sebagai penanggung jawab,
- b) Sekretaris kelurahan sebagai koordinator teknis,
- c) Kasi kesejahteraan dan kader posyandu sebagai pelaksana lapangan,
- d) Puskesmas sebagai mitra medis,
- e) PKK sebagai penyuluh,
- f) RT/RW sebagai perpanjangan informasi ke masyarakat.

Program PMT posyandu memerlukan pengorganisasian logistik yang cukup detail, termasuk pencatatan jumlah balita penerima, pengelolaan stok PMT, hingga penjadwalan distribusi. Mekanisme kerja antar pengurus posyandu disusun untuk memastikan satu telur per minggu dapat diterima oleh seluruh balita sasaran secara merata. Namun, terdapat kendala dalam pengorganisasian di lapangan, terutama karena partisipasi masyarakat belum konsisten. Keterlambatan warga hadir ke posyandu menyebabkan alur distribusi menjadi tidak efisien dan memaksa kader melakukan penyesuaian jadwal dadakan. Kondisi ini menuntut sistem koordinasi yang lebih fleksibel dan responsif.

Meskipun demikian, struktur pengorganisasian di Suka Asih relatif sudah berjalan sesuai pedoman. Yang perlu diperkuat adalah pengaturan alur komunikasi, mekanisme reminder warga, serta penguatan peran RT/RW sebagai frontliner dalam mobilisasi masyarakat.

Actuating (Pelaksanaan) Berkaitan dengan bagaimana perencanaan terimplementasi

Pembahasan program SATEASAMI disampaikan sebagai gambaran historis pelaksanaan program sebelumnya sebelum difokuskan pada PMT Posyandu. Tahap actuating menunjukkan bagaimana rencana yang disusun benar-benar dijalankan. Pada kelurahan, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan aparaturnya dan kader dalam menggerakkan masyarakat.

Pelaksanaan program stunting di Suka Asih mencakup dua program utama:

a. Program SATEASAMI (Satu Telur Satu Minggu)

Program ini merupakan intervensi gizi dari Pemerintah Kota Tangerang yang fokus pada peningkatan protein hewani bagi balita. Pelaksanaan di kelurahan meliputi:

- pendataan balita penerima,
- pengambilan telur secara berkala,
- pencatatan balita yang aktif dan tidak aktif,
- penyampaian edukasi singkat mengenai manfaat protein.

Program ini relatif mudah dijalankan karena logistik dan pembiayaan berasal dari pemerintah kota. Namun tantangannya adalah kedisiplinan warga dalam pengambilan telur, yang berdampak pada akurasi pencatatan data penerima.

b. Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di Posyandu

PMT diberikan untuk balita yang membutuhkan penguatan nutrisi tambahan. Pelaksanaannya mencakup penimbangan dan pengukuran balita, pemasakan atau pembagian makanan bergizi, konseling gizi oleh kader, serta pendokumentasian status gizi anak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; Rahmawati et al., 2020). Pelaksanaannya mencakup:

- penimbangan dan pengukuran balita,
- pemasakan atau pembagian makanan bergizi,
- konseling gizi oleh kader,
- pendokumentasian status gizi anak.

Pelaksanaan PMT berjalan cukup baik karena dibantu kader yang sudah terlatih. Namun hambatan serupa muncul: banyak warga datang terlambat, sehingga penimbangan dan pembagian PMT sering molor dari jadwal.

Solusi Lapangan: Pengingat Personal

Untuk mengatasi rendahnya kedisiplinan masyarakat, perangkat kelurahan dan kader posyandu melakukan pengingat satu per satu melalui pesan pribadi, chat WhatsApp, atau pemberitahuan langsung ke rumah warga. Strategi ini cukup efektif meningkatkan kehadiran, meskipun menambah beban kerja kader.

Dari sisi *actuating*, pemerintah kelurahan telah menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan program. Namun masih diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar partisipasi warga meningkat secara mandiri, bukan semata karena diingatkan.

Controlling (Pengawasan)

Pengawasan merupakan fungsi penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Di Suka Asih, fungsi *controlling* dilakukan melalui:

- a. Monitoring posyandu setiap bulan, termasuk rekapitulasi status gizi balita.
- b. Evaluasi penerimaan SATEASAMI, untuk mengetahui balita aktif, balita tidak hadir, dan kebutuhan stok telur mingguan.
- c. Pelaporan berkala ke tingkat kecamatan dan puskesmas mengenai perkembangan balita stunting.
- d. Tindak lanjut terhadap balita yang tidak hadir, baik melalui kunjungan rumah maupun koordinasi dengan RT/RW.
- e. Pengendalian administrasi, seperti pencatatan skor gizi, catatan pertumbuhan, serta daftar penerima PMT.

Kendala utama dalam pengawasan adalah ketidakteraturan kehadiran warga, yang menghambat konsistensi pencatatan dan analisis data. Ketika balita tidak datang rutin, status gizi mereka menjadi sulit dipantau secara akurat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kelurahan memperkuat *controlling* melalui metode *reminder*, cross-check data antar kader, serta pencatatan manual dan digital secara paralel. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada balita yang terlewat dalam program intervensi. Secara umum, fungsi *controlling* di Suka Asih sudah berjalan namun masih perlu peningkatan pada mekanisme monitoring jangka panjang dan pelaporan yang terpadu (Pretty, 1995; Dwiyanto, 2011; Mardiasmo, 2018).

Hasil pemantauan program PMT Posyandu menunjukkan adanya penurunan kasus stunting di Kelurahan Suka Asih. Meskipun data numerik tidak tersedia secara rinci, pengamatan dari kader posyandu dan laporan puskesmas mengindikasikan balita dengan status gizi kurang mulai berkurang. Penurunan ini diperkirakan berkaitan dengan keberlanjutan intervensi gizi, edukasi keluarga, serta distribusi PMT yang konsisten.

4. KESIMPULAN

Penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan berdasarkan pendekatan POAC di Kelurahan Suka Asih telah dilaksanakan secara efektif dalam penanganan stunting. Pada tahap perencanaan (*Planning*), strategi program disusun berdasarkan data balita dan keluarga berisiko, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan perilaku masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah kelurahan untuk menargetkan penerima PMT secara tepat, sekaligus menyesuaikan jadwal dan mekanisme distribusi agar program berjalan optimal.

Tahap pengorganisasian (*Organizing*) dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas antar aparat kelurahan, kader posyandu, PKK, serta RT/RW. Pengorganisasian ini mencakup pengelolaan stok PMT, pencatatan balita penerima, serta koordinasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lancar meskipun terdapat kendala terkait partisipasi masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan (*Actuating*), PMT Posyandu dijalankan dengan dukungan kader terlatih, mekanisme pengingat untuk meningkatkan kehadiran warga, dan edukasi gizi bagi keluarga. Pelaksanaan ini mencerminkan komitmen aparat kelurahan dalam menjamin intervensi gizi tersampaikan dengan baik, meskipun partisipasi masyarakat masih memerlukan penguatan melalui pemberdayaan warga.

Tahap pengendalian (*Controlling*) dilakukan melalui monitoring rutin, evaluasi penerimaan PMT, pencatatan status gizi, serta tindak lanjut terhadap balita yang tidak hadir.

Hasil pengawasan menunjukkan adanya penurunan kasus stunting, meskipun data kuantitatif belum tersedia secara lengkap. Dengan berakhirnya program SATEASAMI, keberlanjutan penanganan stunting saat ini sepenuhnya bergantung pada efektivitas PMT Posyandu.

Secara keseluruhan, penerapan POAC di Kelurahan Suka Asih memperlihatkan bahwa manajemen yang terstruktur, berbasis data, dan adaptif dapat meningkatkan efektivitas program penanganan stunting. Partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi faktor kunci, sehingga pemberdayaan warga perlu terus ditingkatkan agar program dapat berjalan mandiri, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan stunting.

5. REFERENSI

- Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada anak balita di wilayah pedesaan dan perkotaan. *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 3(1), 163–170.
- Bappenas. (2020). *Strategi nasional percepatan pencegahan stunting 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition*, 14(4), e12617.
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., et al. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayati, L., & Mahmudah, U. (2021). Faktor determinan kejadian stunting pada balita. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 123–132.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2021*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Strategi nasional percepatan pencegahan stunting*. Jakarta: Kemenko PMK.
- Kurniawati, D., Sulastri, S., & Handayani, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu untuk pencegahan stunting. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 45–54.
- Lubis, R. A., Siregar, M., & Hasibuan, N. (2023). Peran pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45–58.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Pratama, R., & Nugroho, A. (2020). Penerapan fungsi manajemen POAC dalam organisasi sektor publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 87–98.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250–265.
- Pretty, J. (1995). *Participatory learning and action*. London: IIED.
- Putra, A. R., & Suryani, D. (2022). Tantangan intervensi stunting berbasis komunitas. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 14(1), 33–41.
- Rahmaddian, T., Handayani, S., & Putri, A. (2022). Pengabdian masyarakat dalam pencegahan stunting melalui posyandu. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 5(2), 110–118.

- Rahayu, S., Wulandari, D., & Lestari, P. (2021). Optimalisasi peran posyandu dalam penanggulangan stunting. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 7(1), 55–63.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). Boston: Pearson Education.
- Rosha, B. C., Sari, K., & Amaliah, N. (2017). Peran intervensi gizi dalam penurunan stunting di Indonesia. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 27(2), 89–98.
- Siagian, S. P. (2014). *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryanto. (2019). Peran pemerintah desa dalam pembangunan kesehatan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 101–112.
- Terry, G. R. (1974). *Principles of management*. Homewood: Richard D. Irwin.
- Torlesse, H., Cronin, A. A., Sebayang, S. K., & Nandy, R. (2016). Determinants of stunting in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition*, 12(S1), 66–80.
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021*. New York: UNICEF.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan publik*. Malang: UMM Press.
- World Health Organization. (2020). *Levels and trends in child malnutrition*. Geneva: WHO.